

CATATAN KONSEP

Melacak dana untuk mitra penting

Lokakarya, Paris, November 6-7, 2023

Latar Belakang

Lokakarya ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan dan melembagakan pelacakan pendanaan yang masing-masing menargetkan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.¹

Tidak terlihatnya Masyarakat Adat dalam data resmi dan statistik tetap menjadi hambatan utama untuk memahami dan mengatasi situasi mereka. Di mana data atau estimasi ada, mereka berbicara lantang tentang diskriminasi dan marginalisasi Masyarakat Adat, tetapi juga menunjukkan peran penting mereka untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada skala global. Sebagai contoh, Masyarakat Adat mewakili sekitar 6,2 % dari populasi dunia, tetapi 18,7 % dari orang miskin tingkat ekstrim². Pada saat yang sama, diperkirakan 36% dari hutan utuh yang tersisa di dunia dan setidaknya 24% dari karbon atas tanah di hutan tropis³ ditemukan di dalam wilayah Masyarakat Adat.

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal adalah mitra yang sangat diperlukan untuk mencapai agenda 2030, *Paris Agreement* serta *Global Biodiversity Framework*. Namun, strategi pendanaan yang ada tidak mencerminkan peran penting mereka. Meskipun tidak ada data akurat yang tersedia, *Rainforest Foundation Norwegia* memperkirakan bahwa pendanaan untuk hak penguasaan dan pengelolaan hutan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal berjumlah kurang dari 1 persen dari bantuan pengembangan iklim internasional dari 2011-2020⁴. Kontras yang mencolok antara peran Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sehubungan dengan mitigasi perubahan iklim dan akses mereka yang sangat terbatas ke pendanaan telah mendatangkan perhatian di seluruh dunia dan, secara positif, aksi. Misalnya, *Global Biodiversity Framework Fund (GBFF)* yang baru-baru ini didirikan akan mendedikasikan 20 persen sumber dayanya untuk mendukung inisiatif yang dipimpin Masyarakat Adat untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. Ini merupakan insentif kuat lain untuk memastikan pelacakan pendanaan yang memadai kepada Masyarakat Adat.

¹ Istilah “Komunitas Lokal” digunakan di sini berdasarkan referensi pada pasal 8(j) dari *Convention on Biological Diversity*, yang menyebutkan bahwa Komunitas Lokal “mewujudkan gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan penggunaan sumber keragaman hayati yang berkelanjutan”. Oleh karena itu, merupakan hal yang relevan untuk melacak pendanaan ke komunitas ini, tanpa mencampurkan perbedaan kategori dari Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat..

² ILO, 2019: 13: *Implementing the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169: Towards an inclusive, sustainable and just future*. Tersedia [di sini](#)

³ Lihat data dari [World Resources Institute](#)

⁴ *Rainforest Foundation Norway, 2021: [Falling short](#)*

Data yang tersedia juga menunjukkan bahwa sebagian besar pendanaan yang menargetkan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal disalurkan melalui modalitas pendanaan tidak langsung. Misalnya, hanya 7% dari dana yang dicairkan di bawah ikrar sebesar USD 1,7 miliar untuk memajukan hak penguasaan dan penjagaan hutan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang disalurkan langsung ke organisasi mereka⁵. Biaya transaksi yang terkait dengan modalitas pendanaan tidak langsung saat ini dan proporsi dana yang mencapai wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sebagian besar tidak diketahui. Namun, organisasi dan wilayah mereka tetap kekurangan dana, dan pendanaan seringkali tidak dapat diprediksi, kompetitif dan terfragmentasi.

Pelacakan pendanaan donor tidak merata dan terutama terkait dengan inisiatif dan komitmen yang terikat waktu. Kondisi ini membatasi pemantauan dan keberlanjutan lintas sektoral yang komprehensif dari waktu ke waktu. Selain itu, pelacakan tersebut didasarkan pada sistem pelaporan sendiri, yang membuat perbandingan dan agregasi data menjadi sulit dan meningkatkan risiko kesalahan dan beragam interpretasi konsep dan *tag*. Dalam hal Komunitas Lokal, tidak adanya kriteria identifikasi yang disepakati secara internasional merupakan tantangan lain.

Pemantauan pendanaan yang lebih sistematis untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal akan sangat penting untuk:

- Menginformasikan dialog kebijakan antara Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, negara, donor bilateral dan filantropis, lembaga PBB, lembaga keuangan pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil;
- Meningkatkan akuntabilitas dan koordinasi antara para aktor ini;
- Menginformasikan dan mengarahkan strategi untuk mencapai Sustainable Development Goals, Paris Agreement on Climate Change dan Global Biodiversity Framework;
- Menilai dan mengevaluasi dampak di lapangan, termasuk terkait dengan modalitas pendanaan yang berbeda;
- Mendorong perubahan kebijakan, dan mengarahkan pendanaan supaya mengalir ke tempat dimana kebutuhan dan dampaknya paling mendesak dan penting.

Sinergi dan upaya bersama

Mengatasi kesenjangan data akan membutuhkan kolaborasi dan upaya bersama. Secara positif, beberapa organisasi sudah bekerja di bidang ini:

- Di bawah platform Shandia⁶, Aliansi Global Masyarakat Teritorial (GATC) mengumpulkan data tentang pendanaan yang menargetkan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, termasuk informasi yang disediakan secara langsung oleh anggota GATC. Selain itu, GATC akan menggunakan pengalaman ini untuk mendokumentasikan tantangan dan praktik baik dengan tujuan untuk menguraikan metodologi yang layak untuk meningkatkan pelacakan dan pengumpulan data pada pendanaan;
- Rainforest Foundation Norwegia, bekerja sama dengan Indufor, sedang dalam proses memperbarui analisis bantuan pengembangan iklim internasional dari tahun 2021-23 dan bermaksud untuk membuat data tingkat proyek, yang mereka ambil dari database yang tersedia untuk umum, mudah diakses oleh masyarakat umum;

⁵ Forest Tenure Funders Group [Annual Report 2021-2022](#)

⁶ Lihat GATC [Shandia](#)

- International Funders for Indigenous Peoples (IFIP) telah menerbitkan tren pendanaan filantropis, termasuk untuk Perempuan Adat, dan saat ini sedang melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyusun dan menganalisis dana untuk Masyarakat Adat⁷.

Selain itu, ada lembaga dengan mandat spesifik untuk memantau aliran dana dari donor bilateral dan filantropis, lembaga PBB, lembaga keuangan pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil, yang berpotensi menghasilkan data yang lebih spesifik tentang pendanaan untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Lembaga ini termasuk:

Development Assistance Committee Organisasi dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD-DAC), yang melacak aliran dana untuk pembangunan, termasuk melalui definisi standar pengukuran internasional. Statistik OECD memberikan gambaran tentang bagaimana *Official Development Assistance (ODA)* digunakan, tetapi juga termasuk informasi dari beberapa yayasan filantropis terbesar yang bekerja untuk pengembangan⁸. Statistik OECD termasuk “penanda kebijakan” untuk melacak dimasukkannya tujuan kebijakan tertentu, mis. terkait dengan kesetaraan gender, penyandang disabilitas, konservasi keanekaragaman hayati dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim⁹. Namun, tidak ada penanda kebijakan khusus dalam sistem untuk melacak pendanaan yang menargetkan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Dimasukkannya penanda kebijakan pada Masyarakat Adat secara teknis memungkinkan tetapi perlu disepakati dan disetujui oleh *Working Party on Development Finance Statistics (WP-STAT)*¹⁰ DAC. Pendekatan lain dalam mengekstraksi data dari statistik OECD dapat mencakup pencarian kata kunci atau penggunaan alat klasifikasi teks canggih.

International Aid Transparency Initiative (IATI) bertujuan untuk meningkatkan transparansi ODA dan keuangan swasta ke negara-negara berkembang. Lebih dari 1.500 organisasi, termasuk pemerintah donor, lembaga keuangan pembangunan, lembaga PBB, LSM, yayasan dan organisasi sektor swasta menerbitkan informasi tentang pengeluaran dan kegiatan mereka melalui IATI. Penanda kebijakan IATI selaras dengan OECD-DAC dan tidak termasuk penanda untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Portal data IATI memungkinkan pencarian kata, yang memberikan informasi berguna tentang proyek yang secara eksplisit menyebutkan istilah “Masyarakat Adat (*indigenous*)” dalam deskripsi narasinya¹¹. Namun, hasil pencarian membutuhkan pemilahan dan analisis yang substansial sebelum menghasilkan data agregat yang dapat menginformasikan dialog kebijakan, strategi dan pemrograman.

Selain itu, *UN-System* memberikan perhatiannya pada tantangan data yang ada. Forum Permanen PBB untuk Masalah-Masalah Masyarakat Adat, pada sesi pada bulan April 2023, mengeluarkan rekomendasi khusus mengenai pelacakan pendanaan ke OECD-DAC:

“Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pembiayaan bagi Masyarakat Adat, Forum Permanen

⁷ Lihat lebih lanjut di website [IFIP](#)

⁸ Statistik OECD dengan demikian mencakup data dari kedua donor bilateral ke *Forest Tenure Pledge* (Jerman, Norwegia, Belanda, Inggris, AS) dan juga data dari beberapa filantropi besar yang berkontribusi pada Ikrar itu (*Bezos Earth Fund, David dan Lucile Packard Foundation, Ford Foundation, Gordon dan Betty Moore Foundation dan Oak Foundation*).

⁹ <https://www.oecd.org/dac/environment-development/rioconventions.htm>

¹⁰ <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/wp-stat.htm>

¹¹ Lihat IATI D-Portal di [sini](#)

merekomendasikan agar Development Aid Committee dari Organisation for Economic Co-operation and Development memasukkan penanda kebijakan dalam sistem statistiknya untuk pelaporan bantuan pembangunan untuk memfasilitasi pelacakan pendanaan yang dialokasikan untuk Masyarakat Adat di semua sektor”(UNPFII, 2023, Art. 93)¹².

Pelacakan pendanaan yang lebih sistematis juga sangat penting untuk UN Inter-Agency Support Group on Indigenous Issues (IASG), yang berfungsi untuk mengimplementasikan System-Wide Action Plan (SWAP) pada Masyarakat Adat¹³. Di antara masalah-masalah lain, SWAP bertujuan untuk memastikan bahwa UN Country Teams memiliki akses ke data yang relevan dalam persiapan UN Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) untuk memberikan dukungan yang koheren dan efektif kepada negara-negara dalam mencapai 2030 Agenda, termasuk bagi Masyarakat Adat.

Lokakarya dua hari yang diusulkan bertujuan untuk menyatukan inisiatif dan institusi utama, untuk membahas tantangan, pengalaman, dan strategi bersama dan upaya untuk mengatasi kesenjangan data saat ini.

TUJUAN DAN HASIL

Tujuan keseluruhan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan akses Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk pendanaan yang mendukung peran mereka sebagai mitra penting dalam mencapai target *Paris Agreement* tentang perubahan iklim, *Global Biodiversity Framework* dan Agenda 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan.

Lebih khusus lagi, lokakarya ini akan membahas:

- Pengalaman Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, LSM, donor dan organisasi internasional dalam melacak dan memantau dana untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal,
- Cara meningkatkan pemantauan aliran pendanaan ke Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, dengan maksud untuk meningkatkan transparansi, koordinasi, dialog, dan strategi.

Hasil yang diharapkan adalah seperangkat rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti:

- Meningkatkan dialog, koordinasi, dan komplementaritas antara aktor-aktor utama yang bekerja untuk meningkatkan pelacakan pendanaan untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal,
- Menyusun dan melembagakan pelacakan aliran pendanaan ke Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

ORGANISASI LOKAKARYA

Lokakarya ini diselenggarakan oleh Aliansi Global Komunitas Teritorial¹⁴ dan Charapa¹⁵ dengan dukungan dari *Indigenous Peoples Rights International*, *International Funders of Indigenous Peoples*,

¹² Lihat laporan lengkapnya di [sini](#)

¹³ Lihat penjelasan lengkap *dari System-Wide Action Plan* di [sini](#)

¹⁴ <https://globalalliance.me>

¹⁵ Lihat: www.charapa.dk



Rainforest Foundation Norwegia, Rainforest Foundation US, Rights and Resources Initiative, Tinta, United Nations Development Programme dan Forum Permanen PBB untuk Masalah-Masalah Masyarakat Adat. Lokakarya ini diselenggarakan dengan dukungan keuangan dari Ford Foundation, David and Lucile Packard Foundation dan Christensen Fund.

Lokakarya ini akan mengumpulkan sekitar 50 peserta, termasuk narasumber kunci dari Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, donor bilateral, filantropi, lembaga multilateral, organisasi masyarakat sipil serta lembaga dengan mandat dan peran dalam pemantauan pembangunan, keuangan bidang iklim dan keaneka ragaman hayati.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Birgitte Feiring di bfeiring@gmail.com